

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. PRIMKOPPOL mapolda Sumbar ini, pendirian koperasi ini telah mendapat pengesahaan dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Hukum No. 1094/BH-XVII pada tanggal 17 Juli 1976. Anggaran Dasar koperasi ini telah diubah sesuai dengan hasil Rapat Anggota, Khusus Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25 April 2000. Perubahan ini sudah di daftarkan ke Kantor Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan telah mendapat pengesahan dengan Surat Keputusan Nomor : 09-KEP/PAD/KDK301/XII/2000 pada tanggal 5 Desember 2000. Mekanisme dalam melakukan Perjanjian Simpan Pinjam Pada PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR ini, harus melalui tahap - tahap serta beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Anggota Polisi atau PNS Polri yang melakukan peminjaman harus mengajukan Surat Permohonan.
- 2) Surat Permohonan dari Satuan Kerja (SATKER) yang berisi tanda tangan Pemohon yang bersangkutan, dan Permohonan kepada Ketua Satuan Kerja (KASATKER) dan di berikan kepada PRIMKOPPOL.

3) Lalu, jika peminjaman tersebut layak dan tidak ada masalah maka koperasi akan menyetujui dan mencairkan dananya.

2. Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam Pada PRIMKOPPOL bagi Anggota Polisi yang dimutasi, yang seharusnya yaitu penyelesaiannya dengan pemotongan gaji oleh Bensatker pada Satker baru dimana tempat anggota polisi tersebut dimutasikan. Namun, hal tersebut belum terrealisasikan, karena kerjasama antara polres – polres belum sinkron. Sehingga, kewajiban bagi anggota polisi yang dimutasi yaitu melunasi segala kewajibannya pada Primkoppol mapolda sumbar, tetapi karena banyak yang tidak sanggup untuk melunasi, maka dari itu banyak anggota polisi yang memohon untuk pembayaran via transfer dan ada beberapa yang melunasi kewajibannya. Mengenai hal tersebut selalu dibahas pada saat rapat di Puskoppol mengenai penagihan bagi anggota polisi yang dimutasi, permasalahannya selalu mengenai penagihan. Penyelesaiannya saat ini dilakukan dengan cara kekeluargaan, tidak sampai pada jalur hukum. Jika dalam melakukan pembayaran melalui ATM, belum juga ditransfer oleh anggota polisi tersebut, maka tindakan dari PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR yaitu mengingatkan dengan cara menelfon atau sms. Dan juga ada sekitar 10 % anggota polisi yang dimutasi yang terlambat 1 bulan dalam melakukan pembayaran, namun tindakan dari Primkoppol yaitu memberi surat teguran ke Polres tempat dimana anggota polisi tersebut di mutasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Untuk PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR sebaiknya perjanjian simpan pinjam berupa Surat Pernyataan dan Kuasa mengenai klausula : “Apabila Pemberi Kuasa pindah (dimutasikan) maka pemotongan gaji dilakukan oleh Bensatker pada Satker yang baru” itu dilaksanakan sebagai mana yang telah dimuat di dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut. Sebaiknya, secepatnya dilakukan kerjasama dengan polres - polres Karena, hal tersebut dapat mempermudah PRIMKOPPOL dalam melakukan penagihan terhadap Anggota Polisi yang dimutasi, serta dapat mengurangi hal – hal keterlambatan atau sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan koperasi itu sendiri.
2. Untuk Anggota Polisi yang dimutasi, Di dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut juga memuat klausula : “Dari hasil pemotongan gaji tersebut di atas, Penerima kuasa bertanggung jawab untuk menyetorkan ke Bendahara PRIMKOPPOLDA SUMBAR paling lambat tanggal 4 setiap bulannya” hal tersebut sebaiknya dilaksanakan, karena telah menjadi kewajiban dalam melakukan pembayaran setiap tanggal 4, serta dapat memperkecil terjadinya keterlambatan atau wanprestasi di dalam proses pembayaran melalui transfer. Dan juga mempermudah Bensatker untuk menyetor ke Bendahara PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR.